



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADIB ADLI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 435865

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.387.826.915**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 1.506.945.000
2. Tanah Seluas 333 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 133.200.000
3. Tanah Seluas 306 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
4. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 443.181.915
5. Tanah Seluas 291 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Bangunan Seluas 225 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.203.000.000
7. Tanah Seluas 555 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **553.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



3. MOTOR, HONDA CBR P5E02R22M1 M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

4. MOBIL, HONDA CITY HB 1,5L RS CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	466.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	209.487.158
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	264.361.943
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.881.176.016
III. HUTANG	Rp.	407.065.328
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.474.110.688

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.